

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH BANTUAN
PEMERINTAH PUSAT DI LIMA KABUPATEN / KOTA
DI JAWA TENGAH**

Oleh: Sri Nawatmi

Dosen STIE Stikubank Semarang

ABSTRACT

Otonomy expected to region empowerment increase, so aid from central government decrease. Thus, the state budgets burden can decrease. Unfortunatly, no every region ready to otonomy. Because of that, it's important to research about what's the determinant of the aid from central government to regions. The object is Jawa Tengah, especially Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Surakarta and Wonogiri. This paper present research with data pooling. The model estimated with GLS (Generalized Least Square) method. The research produced : The correct model is FEM (Fixed Effect Model). The significant variable is PDRB (positif), own source revenue (negative) and numbers of people (negative). The best aid accepted by Klaten and Surakarta at least if value of independent variables is nol.

Keywords : Data pooling, GLS, FEM, REM, Common model

I. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah dapat dilakukan dengan sisten sentralisasi ataupun desentralisasi atau istilahnya otonomi daerah.

Dengan menurunnya penerimaan dari minyak dan gas bumi, sejak tahun 1980-an, maka pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah dengan tujuan agar bantuan dari pemerintah pusat dapat dikurangi dan sekaligus mengurangi beban APBN. Hal itu dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan akan memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik (*good*

governance) di daerah. Di samping itu juga akan memberdayakan masyarakat setempat sehingga memungkinkan masyarakat lokal untuk menikmati kualitas hidup yang lebih baik, maju, tentram dan sekaligus memperluas pilihan-pilihan yang dapat dilakukan masyarakat.

Sejalan dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah maka terjadi perubahan pada sumber pendapatan daerah yaitu dimasukkannya komponen dana perimbangan dalam kebijakan atau struktur APBD. Kebijakan dana perimbangan merupakan konsekuensi dari strategi desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal diwujudkan dalam bentuk kebijakan dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil baik dari pajak maupun sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh langsung terhadap keuangan daerah, khususnya terhadap sumber pendapatan daerah.

Dalam melakukan desentralisasi fiskal perlu kompromi antara pemerintah pusat dan daerah karena menyangkut pembagian pendapatan antara pusat dan daerah. Transfer fiskal dari pusat ke daerah adalah alternatif terbaik dari beberapa sistem yang ada. Namun sistem ini juga tak lepas dari kekurangan jika dilihat dari sisi obyektifitas maupun kondisi riil setiap daerah.

Daerah yang sangat miskin sumber daya alam dan relatif padat penduduknya dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, maka transfer dana ke daerah relatif besar. Sebaliknya jika daerah kaya sumber daya alam, jumlah penduduknya relatif sedikit dengan infrastruktur yang memadai maka daerah ini disebut daerah mandiri yang mampu melaksanakan otonomi daerah sehingga tidak membutuhkan transfer dana dari pusat.

Di masa mendatang diharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat bisa diminimalisir sehingga tidak membebani pemerintah pusat di samping itu juga akan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Akan tetapi di Jawa Tengah dilihat dari sisi besarnya bantuan pemerintah pusat ke daerah justru cenderung meningkat, di mana pada tahun 1995/1996 besarnya bantuan pusat adalah Rp 20.852.577.000 kemudian tahun 1996/1997 meningkat menjadi Rp 33.404.857.000. Tahun 1997/1998 besarnya bantuan pusat Rp 15.764.778.000 dan kemudian menurun menjadi Rp 15.291.335.000 pada tahun 1998/1999. Tahun 2000 terjadi penurunan bantuan pusat yang cukup besar menjadi hanya Rp 11.128.255.000 akan tetapi kemudian meningkat tajam pada tahun 2001 yaitu Rp 41.706.194.000 dan meningkat lagi lebih dari dua kali lipat pada tahun 2002 menjadi sebesar Rp 93.885.420.000. Dan pada tahun 2003 bantuan pusat menurun menjadi seperti tahun 2001 yaitu sebesar Rp 43.430.737.000 (BPS: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I).

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya bantuan pemerintah pusat ke lima daerah di Jawa Tengah yaitu di daerah Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Surakarta dan Wonogiri. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah membuktikan secara empiris apakah terdapat hubungan antara variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP), subsidi daerah otonom (SDO), Produk domestik regional bruto (PDRB) dan jumlah penduduk dengan variabel terikatnya yaitu bantuan pemerintah pusat.

II. LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

Menjelang berakhirnya tahun 2000 dan memasuki tahun 2001, sistem otonomi daerah direalisasikan. Konsep dasarnya adalah memberikan wewenang kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, dan pemerintah pusat akan membantu dan memelihara kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di daerah seperti masalah kebijakan moneter, pembangunan jalan antar kota dan propinsi, maupun pemeliharaan sistem pengairan yang melintasi berbagai wilayah.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, tidak akan lepas dari kesiapan masing-masing daerah baik dari segi keuangan maupun kesiapan sumber daya manusianya. Dengan adanya otonomi daerah diperlukan manusia yang mampu mengelola dana yang ada dan kreatif dalam menciptakan pelayanan kepada masyarakat termasuk sumber-sumber dana untuk pembiayaannya.

2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran merupakan alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (pendapatan) di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Di samping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan baik pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang.

Dalam UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban APBD sedangkan penyelenggaraan tugas pemerintah (pusat) di daerah dibiayai dari dan atas beban APBN.

Dana APBD diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas pemerintah daerah, termasuk tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan yang sudah dilimpahkan atau didesentralisasikan pusat ke daerah. Penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah. Selama ini pelaksanaan pemerintahan di daerah sebagian besar dibiayai oleh pusat melalui bantuan pusat atau subsidi daerah otonom (SDO). Pendapatan

asli daerah tidak banyak diharapkan. Oleh sebab itu PAD saja, untuk saat inipun, tidak cukup untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga perlu memahami dari mana sumber keuangan daerah itu akan diperoleh.

2.2. Sumber Pendapatan Daerah

Sejak pemerintahan orba berakhir, masalah otonomi daerah semakin diperhatikan. Seperti yang dijelaskan di depan bahwa sejak penerimaan dari migas menurun, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan PAD dengan maksud agar subsidi atau bantuan pemerintah pusat bisa dikurangi dan mengurangi beban APBN.

Untuk merealisasikan keinginan tersebut pada tahun 1997 telah lahir Undang-Undang Republik Indonesia No. 18/1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disusul dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 19/1997 tentang pajak daerah, Peraturan Pemerintah No.20/1997 tentang retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah No. 21/1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Tekad pemerintah pusat untuk meningkatkan peranan pemerintah daerah dipertegas dengan lahirnya undang-undang otonomi daerah yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah pusat telah siap untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peranan pemerintah daerah pada posisi yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Peranan pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang utama di samping dana perimbangan yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam akan sangat menentukan kekuatan dari APBD.

Sebelum dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah tahun 1999, sumber keuangan daerah baik propinsi, kabupaten maupun kotamadya menurut UU No. 5 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Asli Daerah (PAD)
2. Bagi hasil pajak dan non pajak
3. Bantuan pusat untuk daerah tingkat I dan tingkat II
4. Pinjaman daerah
5. Sisa lebih anggaran tahun lalu
6. Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Sesuai dengan pasal 79 UU No. 22 Tahun 1999 dan pasal 3, 4, 5 dan pasal 6 UU No. 25 Tahun 1999, sumber pendapatan adalah :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari :

- a. pajak daerah
 - b. retribusi daerah
 - c. bagian pemda dari hasil keuntungan BUMD
 - d. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
2. Dana perimbangan yang terdiri dari :
 - a. dana bagi hasil
 - b. dana alokasi umum
 - c. dana alokasi khusus
 3. Pinjaman daerah
 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Salah satu perbedaan yang signifikan antara kedua UU itu adalah mengenai sumber-sumber pendapatan daerah. Dalam ketentuan lama menyebutkan, bantuan pusat ke daerah baik propinsi, kabupaten maupun kotamadya melalui kebijakan dana instruksi presiden (inpres) dan subsidi daerah otonom (SDO) serta inpres desa tertinggal (IDT) (1994-1995). Sedangkan ketentuan dalam UU yang baru, bantuan pusat dihapus dan digantikan dengan dana perimbangan yang intinya bahwa daerah otonom yang menerima dana perimbangan memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan menggunakannya.

2.3. Pembagian Dana Perimbangan

Berdasar Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah akan dilaksanakan dengan melihat pada sumber pendapatannya sebagai berikut :

a. Penerimaan dari pajak dan bukan pajak

Penerimaan dari pajak hanya diperoleh dari pajak bumi dan bangunan serta bea yang dibayar dalam perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penerimaan tersebut seluruhnya akan dibagikan ke daerah kabupaten dan kota dalam bentuk dana alokasi umum.

b. Dana alokasi umum

Sumber keuangan lainnya untuk pemerintah daerah berasal dari dana alokasi yang berasal dari pemerintah pusat yang dulunya disebut dana subsidi atau ganjaran. Dana ini sesungguhnya berasal dari dana yang dikumpulkan dari bagian hasil penerimaan PBB dan bea perolehan hak atas bumi dan bangunan. Dana alokasi ini dibedakan menjadi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Dana alokasi umum yang dibagikan kepada daerah berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan nilainya minimum 25% dari anggaran rutin dalam APBN. Dana ini dialokasikan 10% untuk propinsi dan 90% untuk kabupaten/kota.

c. Dana alokasi khusus

Dana alokasi khusus juga berasal dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Untuk dana alokasi khusus ini harus ada dana pendamping yang berasal dari APBD guna menyatakan komitmen dan tanggung jawab dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

2.4. Penelitian Sebelumnya

Pertama, Shah dan Qureshi (1994), dengan hasil penelitian sebagai berikut :

$$\text{GPT} = 0.010 + 2.05 \text{ Own} + 1.20 \text{ share} - 10.50 \text{ GRDP}$$

(4.06) (3.32) (3.96) (-3.98)

dimana :

GPT = General Purpose Transfer (Inpres Dati I, Inpres Dati II, Inpres Desa, Inpres Desa Tertinggal)

Own = Own source revenue (pendapatan asli daerah)

Share = Share revenue (bagi hasil pajak dan non pajak)

GRDP = Gross Regional Domestic Product (PDRB)

Dari persamaan tersebut nampak bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap bantuan pemerintah dimana hubungannya adalah searah yaitu jika PAD meningkat maka bantuan pemerintah juga akan meningkat dan sebaliknya. Sedangkan untuk variabel bagi hasil pajak dan non pajak ternyata juga signifikan mempengaruhi bantuan pemerintah dengan tanda yang positif. Artinya jika bagi hasil pajak dan non pajak meningkat maka bantuan pemerintah juga akan meningkat dan sebaliknya. Variabel PDRB berpengaruh juga terhadap bantuan pemerintah tetapi hubungannya negatif yaitu jika PDRB meningkat maka bantuan pemerintah berkurang sedangkan bila PDRB menurun maka bantuan pemerintah akan meningkat.

Kedua, Daryanto (1997) : *Faktor Penentu Subsidi Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Model penelitian mengacu pada model penelitian Shah dan Qureshi. Data yang digunakan adalah data pooling (*pooled time series*). Periode pengamatan dari tahun anggaran 1988/1989 hingga 1994/1995. Sedangkan silang tempat mencakup seluruh Dati II (4 kabupaten dan 1 kota) di propinsi DIY, sehingga jumlah observasi dalam studi ini adalah $7 \times 5 = 35$.

Dari penelitian tersebut di atas di dapatkan hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Bantuan} = & -26593378.994 - 0.670 \text{ PAD} + 0.01388 \text{ BHPBP} + 1.424 \text{ SDO} + 4.039 \text{ YCAP} \\ & (-2.493) \quad (-2,177) \quad (0.042) \quad (1.754) \quad (0.947) \\ & + 48563,931 \text{ POP} + 4395780.667 \text{ D1} - 8260146.490 \text{ D2} - 8020043.039 \text{ D3} - \\ & (1.873) \quad (2.978) \quad (-1.160) \quad (-1.142) \\ & 10432932.318 \text{ D4} \\ & (-1.208) \end{aligned}$$

Dari persamaan di atas nampak bahwa bantuan dipengaruhi oleh PAD dengan tingkat signifikansi 4% dengan tanda yang negatif. Di samping itu bantuan juga dipengaruhi oleh SDO dengan tingkat signifikansi 9% dan berhubungan positif. Jumlah penduduk positif mempengaruhi besarnya bantuan pusat dengan tingkat signifikansi sebesar 7%. Dan terakhir, dummy1 berpengaruh positif terhadap bantuan pemerintah pusat dengan tingkat signifikansi sebesar 0%. Adapun besarnya R square adalah 0.852 dan F test 15.938.

Hipotesis

- Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap bantuan pemerintah pusat.
- Bagi hasil pajak dan bukan pajak berpengaruh terhadap bantuan pemerintah pusat.
- Subsidi daerah otonom berpengaruh terhadap bantuan pemerintah pusat
- Produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap bantuan pemerintah pusat.
- Jumlah penduduk berpengaruh terhadap bantuan pemerintah pusat.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipakai adalah data sekunder, gabungan data time series dan cross section atau menggunakan **data pooling** (*pooled time series*). Adapun data yang dipakai meliputi bantuan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (sebagai variabel terikat), sedangkan variabel bebasnya adalah PAD, Bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP), SDO (subsidi daerah otonom), PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku, dan jumlah penduduk. Sumber data berasal dari Biro pusat Statistik dan Bank Indonesia berbagai terbitan. Untuk data time series, menggunakan periode waktu tahun anggaran 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002 dan 2003 sedangkan data cross section mengambil empat kabupaten yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri dan satu kota yaitu Kota Surakarta.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Bantuan	:	Bantuan pembangunan, merupakan total bantuan yang diterima Dati II
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan dari sumber-sumber asli daerah
BHPBP	:	Bagi hasil pajak dan bukan pajak, merupakan bagian yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah yang dikelompokkan dalam PDS (pendapatan daerah sendiri)
SDO	:	Subsidi daerah otonom yaitu subsidi yang dipergunakan untuk kegiatan belanja rutin (belanja pegawai dan non pegawai)
PDRB	:	PDRB per kapita (berdasarkan harga berlaku)
Jumlah Penduduk	:	Jumlah penduduk yang ada di Dati II

3.3 Perumusan Model

Model penelitian yang dipakai :

$$\text{Bantuan} = b_0 + b_1 \text{ PAD} + b_2 \text{ BHPBP} + b_3 \text{ SDO} + b_4 \text{ YCAP} + b_5 \text{ POP} + \mu$$

Dimana :

Bantuan = Total bantuan pembangunan yang diterima Dati II

PAD = Pendapatan asli daerah

BHPBP = Bagi hasil pajak dan bukan pajak

SDO = Subsidi daerah otonom

YCAP = PDRB per kapita

POP = Jumlah penduduk

μ = Error term

Tehnik Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan **pooled time series** atau populer disebut **data pooling**. Data pooling merupakan kombinasi antara data runtut waktu yang memiliki observasi temporal biasa pada suatu unit analisis, dengan data silang tempat yang memiliki observasi pada suatu unit analisis pada suatu titik waktu tertentu (Sayrs, 1989: 5-7). Jadi bila sejumlah variabel untuk sejumlah silang tempat yang berbeda diobservasi selama kurun waktu tertentu, maka akan diperoleh data pooling. Dengan data pooling maka akan meningkatkan efisiensi dari model yang diestimasi.

Ada dua alasan yang mendasari penggunaan analisis dengan data pooling yaitu pertama, penggunaan data pooling akan meningkatkan jumlah observasi (sampel). Hal ini berarti mengatasi masalah keterbatasan jumlah data runtut waktu yang umumnya dijumpai untuk penelitian bisnis, pasar modal, perusahaan, akuntansi dan regional. Kedua, dengan data pooling akan diperoleh variasi antar unit yang berbeda menurut ruang dan variasi yang muncul menurut waktu.

Tehnik yang dipakai adalah GLS (*Generalized Least Square*). Ada 2 pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data pooling yaitu pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *least square dummy variable* (LSDV) yang menganggap slope koefisien adalah konstan tetapi intercept berbeda untuk masing-masing obyek. Kedua, Pendekatan *Random Effect Model* (REM) atau error components model (ECM) yang memperlakukan intercept sebagai variable random untuk masing-masing kelompok.

3.5. Uji Hipotesis

a. *Uji t*. Uji ini dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus :

$$t \text{ hitung} = \text{koefisien regresi (bi)} / \text{standar deviasi bi}$$

Jika t hitung > t tabel pada tingkat kepercayaan tertentu maka H_0 ditolak yang berarti bahwa variabel independen yang diuji signifikan dan sebaliknya jika t hitung < t tabel maka H_0 diterima yang berarti bahwa variabel independen yang diuji tidak signifikan.

b. *Uji F*. Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependent secara keseluruhan. Nilai F hitung dapat dicari dengan rumus :

$$F \text{ hitung} = \{R^2/(k-1)\} / \{(1-R^2)/(N-k)\}$$

Jika F hitung > F tabel maka H_0 ditolak, yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dan sebaliknya jika F hitung < F tabel maka variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.

c. Menguji besaran dari R^2 yang menunjukkan besarnya koefisien determinasi. Dari R^2 kita bisa mengetahui *goodness of fit* (kebaikan suai) dari suatu model, karena R^2 menunjukkan prosentase dari variasi variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh model.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1. Uji Spesifikasi Model

Untuk menentukan model yang dipakai dalam penelitian ini REM atau FEM maka perlu dipertimbangkan (Gujarati, 2003:650) :

- a. Jika T (jumlah data time series) besar dan N (jumlah data cross section) kecil, ada kemungkinan perbedaan nilai parameter yang diestimasi baik dengan FEM maupun REM kecil. Pada kondisi ini lebih baik menggunakan FEM.
- b. Ketika N besar dan T kecil, estimasi yang didapat kedua model berbeda. Jika kita tidak yakin bahwa data cross section yang diambil tidak random maka penggunaan FEM lebih tepat. Tetapi kalau kita yakin data yang diambil random maka digunakan REM.
- c. Jika *individual error component* dan satu atau lebih dari regressor berkorelasi maka penggunaan REM menjadi bias.
- d. Jika N besar dan T kecil dan jika asumsi yang mendasari REM dipegang maka REM lebih efisien dibanding FEM.

Berdasar point pertama, jumlah T besar karena berjumlah sembilan dan jumlah N kecil karena hanya berjumlah lima, berarti model yang tepat adalah FEM. Hal ini diperkuat dengan pertimbangan kedua, dimana pengambilan sample tidak bias dikatakan mewakili atau representasi dari kabupaten atau kota di seluruh Indonesia karena antar propinsi saja kondisinya sudah sangat berbeda apalagi antar kabupaten atau kota. Point ketiga juga memperkuat pendapat tersebut karena dengan terjadinya multikolinieritas antar variable bebas maka kalau menggunakan REM akan bias. Dan kalau dilihat dari uji R square (*goodness of fit*) maka nilai tertinggi terdapat pada model FEM yaitu sebesar 63,28% dibandingkan dengan REM yang hanya 14,98% sedangkan model common 33,22%.

Berdasar alasan-alasan tersebut maka dalam penelitian ini digunakan model fixed effect (FEM).

4.2. Analisis Hasil Regresi

Hasil regresi tiga model (common, random effect dan fixed effect) disajikan dalam tabel berikut :

Tabel-1
Hasil Estimasi

	Model Common	Fixed Effect Model (FEM)	Random Effect Model (REM)
Konstanta (C)	- 3512983 (-0.3999)	-	14082212 (1.973715)**
PDRB (GDP)	1.955221 (1.5281)	5.825028 (3.8812)*	1.367636 (0.9601)
PAD	- 0.169665 (- 0.7468)	0.154863 (- 4.9202)*	- 0.430993 (-2.1586)**
BHPBP (BHP)	- 0.106898 (- 0.4815)	0.154863 (0.9387)	-
Penduduk (PDD)	17.57514 (2.1529)**	-58.54417 (- 1.8254)**	- 1.488428 (- 0.2449)
SDO	- 0.032525 (- 2.0988)**	0.001414 (0.1101)	-
R ²	0.468276	0.703554	0.110939
F test	6.869269	20.76638	-
DW	1.989725	2.568467	1.266443

Keterangan :

-Signifikan 1% = *, 5% = **, 10% = ***.

-Angka dalam kurung adalah t statistik.

-Untuk REM hanya digunakan tiga variabel bebas karena jumlah data cross section harus lebih banyak dari pada jumlah variabel bebasnya. Model REM baru bisa diolah setelah dikurangi dua variabel bebasnya.

Seperti telah dijelaskan di depan bahwa model yang tepat adalah FEM. Dari hasil estimasi tersebut kemudian dilakukan :

a. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Dari hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan VIF, ternyata hasilnya ada disekitar 10 dan RJ2 ada yang disekitar 0,90 sehingga diperkirakan terjadi multikolinieritas. Akan tetapi jika digunakan TOL, diperoleh angka di bawah satu, yang berarti tidak ada multikolinieritas. Di samping itu multikolinieritas biasanya terjadi pada data time series. Dengan menggunakan data pooling maka masalah multikolinieritas secara teknis tidak ada.

Heteroskedastis biasanya muncul pada estimasi yang menggunakan data cross section. Dengan metode GLS yang pada intinya memberikan pembobotan pada variasi data yang digunakan dengan kuadrat varians dari model, secara teknis estimasi ini sudah terbebas dari heteroskedastis.

Untuk uji autokorelasi digunakan uji Durbin Watson. Dari hasil regresi didapatkan nilai DW hitung sebesar 2.57, yang berarti tidak terjadi penyimpangan asumsi autokorelasi.

b. Uji t test

Dari hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM) di dapat persamaan sebagai berikut :

$$\text{BAN} = 5.825028\text{GDP} - 1.338809\text{PAD} + 0.154863\text{BHP} - 58.54417\text{PDD} + 0.001414\text{SDO}$$

Jika diuraikan per daerah kabupaten atau kota maka di dapatkan persamaan :

$$\text{BAN_BOY} = 61435359.08 + 5.825027508*\text{GDP_BOY} - 1.338808796*\text{PAD_BOY} + 0.1548627079*\text{BHP_BOY} - 58.54416878*\text{PDD_BOY} + 0.001414231776*\text{SDO_BOY}$$

$$\text{BAN_KLA} = 76353088.27 + 5.825027508*\text{GDP_KLA} - 1.338808796*\text{PAD_KLA} + 0.1548627079*\text{BHP_KLA} - 58.54416878*\text{PDD_KLA} + 0.001414231776*\text{SDO_KLA}$$

$$\text{BAN_SKJ} = 45684955.8 + 5.825027508*\text{GDP_SKJ} - 1.338808796*\text{PAD_SKJ} + 0.1548627079*\text{BHP_SKJ} - 58.54416878*\text{PDD_SKJ} + 0.001414231776*\text{SDO_SKJ}$$

$$\text{BAN_SKT} = 44417315.06 + 5.825027508*\text{GDP_SKT} - 1.338808796*\text{PAD_SKT} + 0.1548627079*\text{BHP_SKT} - 58.54416878*\text{PDD_SKT} + 0.001414231776*\text{SDO_SKT}$$

$$\text{BAN_WNG} = 75510141.45 + 5.825027508*\text{GDP_WNG} - 1.338808796*\text{PAD_WNG} + 0.1548627079*\text{BHP_WNG} - 58.54416878*\text{PDD_WNG} + 0.001414231776*\text{SDO_WNG}$$

Interpretasi dari model tersebut adalah bahwa PDRB berpengaruh (tingkat signifikansi 0%) positif terhadap bantuan dari pemerintah pusat (lihat lampiran). Jika PDRB naik sebanyak Rp 1 maka akan menyebabkan kenaikan bantuan pusat sebesar Rp5.825028 dan sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Shah dan Quresi, hanya saja hubungannya antara keduanya negatif.

Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap bantuan pemerintah pusat dengan tingkat signifikansi 0% dan hubungannya negatif. Hal ini berarti jika PAD meningkat sebesar Rp 1 maka akan menyebabkan penurunan bantuan dari pusat sebesar RP 1.338809. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Daryanto dengan hubungan juga negatif sedangkan penelitian Shah dan Quresi signifikan tetapi berhubungan positif.

Variabel bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) tidak berpengaruh terhadap bantuan pemerintah pusat karena tingkat signifikansinya rendah yaitu 35,43%. Hal ini bertentangan dengan penelitian Shah dan Qureshi yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan.

Adapun variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap bantuan pusat dengan tingkat signifikansi 7,65% dan bertanda negatif. Artinya jika jumlah penduduk bertambah satu orang maka akan menyebabkan bantuan

menurun sebesar Rp 58,54417. Hasil ini sesuai dengan penelitian Daryanto tetapi hubungannya negative.

Variabel terakhir yaitu subsidi daerah otonom (SDO) hasilnya tidak signifikan (91,29%). Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Daryanto yang menunjukkan hubungan yang positif antara keduanya.

Jika pendapatan regional, pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, jumlah penduduk dan subsidi daerah otonom di daerah Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Surakarta dan Wonogiri tidak ada alias nol maka bantuan pemerintah pusat terbesar akan diterima oleh Kabupaten Klaten (Rp 76.353.088,27) diikuti Kabupaten Wonogiri (Rp 75.510.141.45). Sedangkan yang paling kecil menerima bantuan dari pusat adalah Kota Surakarta yaitu sebesar Rp 44.417.315,06.

Dilihat dari uji F, secara bersama-sama variabel-variabel pendapatan regional, pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, jumlah penduduk dan subsidi daerah otonom berpengaruh terhadap bantuan pemerintah pusat dengan tingkat signifikansi 0%.

Beberapa hal penting yang perlu diungkapkan dalam temuan empiris ini adalah dilihat dari hubungan yang searah antara pendapatan dan bantuan pusat. Berarti antara teori dengan empiris berbeda. Secara teori harusnya dengan meningkatnya pendapatan akan menurunkan bantuan dari pusat karena peningkatan pendapatan berarti meningkatnya kemandirian daerah dalam melakukan pembangunan, tetapi yang terjadi di Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Surakarta dan Wonogiri justru sebaliknya. Hal ini bisa terjadi kemungkinan karena kesadaran masyarakat di daerah yang kaya semakin tinggi sehingga tuntutan mereka untuk mendapat bagian yang lebih besar dari sumber daya alam yang dimilikinya semakin besar.

Untuk variabel pendapatan asli daerah (PAD) sudah sesuai dengan teori yaitu meningkatnya PAD maka kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan semakin baik dengan demikian wajar kalau bantuan dari pusat semakin kecil. Dengan demikian tujuan dari kebijakan otonomi daerah bias tercapai yaitu mendorong daerah untuk lebih berperan dalam memberdayakan ekonomi dan budaya masyarakat secara tepat sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Jumlah penduduk seharusnya berhubungan positif dengan bantuan pusat. Akan tetapi dalam penelitian ini justru berhubungan negatif. Harusnya semakin banyak jumlah penduduk makin banyak bantuan dari pusat agar masyarakat lebih sejahtera hidupnya. Hal ini bisa terjadi karena kepala daerah di daerah yang relatif padat penduduknya dan banyak penduduk miskinnya cenderung enggan menunjukkan bahwa di daerahnya banyak rakyatnya yang miskin atau istilahnya banyak pejabat yang ABS (asal bapak senang). Hal ini terbukti dari banyaknya kepala daerah yang enggan mengakui bahwa ada rakyatnya yang mengalami busung lapar. Kalau kesadaran kepala daerah itu

tinggi atau kalau kepala daerah itu menyadari bahwa jabatan itu amanah, maka mereka akan berusaha untuk memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

V. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini yang cocok untuk digunakan sebagai model adalah FEM (fixed effect model). Dari hasil uji penyimpangan asumsi klasik, tidak terjadi multikolinieritas, heteroskedastisitas maupun autokorelasi.

Dari hasil regresi didapat bahwa variabel pendapatan berpengaruh positif terhadap bantuan pusat. Demikian juga pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk, hanya saja kedua variabel ini berhubungan negatif dengan bantuan pusat. Jika semua variabel bebas tersebut nol nilainya maka bantuan pusat terbanyak diterima oleh Kabupaten Klaten dan terkecil diterima Kota Surakarta.

REFERENSI

- Badi H. Baltagi, 2001, *Econometric Analysis Of Panel Data*, John Wiley & Sons, LTD.
- BPS, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah*, Berbagai Terbitan.
- Daryanto,S. (1997), *Kontribusi Bantuan Pembangunan Terhadap Pembiayaan Pembangunan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi di Seluruh Daerah Tingkat II Daerah Istimewa Yogyakarta*, Unpublished S2 Tesis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Gujarati, D., 2003, *Basic Econometrics*, McGraw-Hill.
- Juli Panglima Saragih, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia.
- Mudrajad Kuncoro, 2001, *Metode Kuantitatif – Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, UPP AMP YKPN.
- Sritua Arief, 1993, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, UI Press.
- Suparmoko, 2002, *Ekonomi Publik – Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Andi Yogyakarta.
- Sayrs, L.W., 1989, *Pooled Time Series Analysis*, London:Sage Publications.

Lampiran : Fixed Effect Model

Dependent Variable: BAN?
 Method: GLS (Cross Section Weights)
 Date: 08/15/05 Time: 12:03
 Sample: 1995 2003
 Included observations: 9
 Number of cross-sections used: 5
 Total panel (balanced) observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GDP?	5.825028	1.500827	3.881213	0.0004
PAD?	-1.338809	0.272104	-4.920213	0.0000
BHP?	0.154863	0.164975	0.938703	0.3543
PDD?	-58.54417	32.07109	-1.825450	0.0765
SDO?	0.001414	0.012840	0.110140	0.9129
Fixed Effects				
_BOY--C	61435359			
_KLA--C	76353088			
_SKJ--C	45684956			
_SKT--C	44417315			
_WNG--C	75510141			

Weighted Statistics			
R-squared	0.703554	Mean dependent var	12185671
Adjusted R-squared	0.627326	S.D. dependent var	7951420.
S.E. of regression	4854109.	Sum squared resid	8.25E+14
Log likelihood	-745.4398	F-statistic	20.76638
Durbin-Watson stat	2.568467	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics			
R-squared	0.622990	Mean dependent var	10556486
Adjusted R-squared	0.526044	S.D. dependent var	7299532.
S.E. of regression	5025322.	Sum squared resid	8.84E+14
Durbin-Watson stat	2.473726		